

**PENGARUH KOALISI PARTAI POLITIK DI PARLEMEN
TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Oleh

Rizky Fairnanda Raka Siwa

NIM. 05040421103



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Fairnanda Raka Siwa
NIM : 05040421103
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Pengaruh Koalisi Partai Politik di Parlemen Terhadap Pembentukan Undang-undang Perspektif *Fiqh Siyasah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 07 Mei 2025



Rizky Fairnanda Raka Siwa

NIM. 05040421103

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rizky Fairnanda Raka Siwa

NIM : 05040421103

Judul : Pengaruh Koalisi Partai Politik di Parlemen Terhadap Pembentukan
Undang-undang Perspektif *Fiqh Siyasah*

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 07 Mei 2025

Pembimbing,


Achmad Safiuddin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rizky Fairnanda Raka Siwa

NIM. : 05020421103

Judul : Pengaruh Koalisi Partai Politik Di Parlemen Terhadap Pembentukan Undang-Undang Perspektif Fiqh Syiyasah

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Pengaji I

Achmad Sajjudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Pengaji II

Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, M.H.
NIP. 196803292000032001

Pengaji III

Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Pengaji IV

Abdul Haris Fitrianto, S.Psi., M.Si.
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 4 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,





UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizky Fairnanda Raka Siwa
NIM : 05040421103
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : fairnanda45@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....) yang berjudul :

Pengaruh Koalisi Partai Politik Di Parlemen Terhadap Pembentukan Undang-undang Perspektif *Fiqh Siyasah*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juni 2025

Penulis

(Rizky Fairnanda Raka Siwa)

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini berfokus pada pengaruh koalisi partai politik dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia terhadap pembentukan undang-undang. Mengingat tingginya keragaman sosial dan kompleksitas dalam politik Indonesia, muncul kebutuhan untuk menganalisis bagaimana dinamika koalisi mempengaruhi kualitas legislasi. Beberapa rumusan masalah yang diangkat antara lain: bagaimana pengaruh koalisi partai politik terhadap pembentukan undang-undang dan bagaimana kualitas legislasi yang dihasilkan dalam perspektif *Fiqh Siyasah*.

Jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian hukum empiris. Terdapat dua sumber data yang diperoleh, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan di Polda Jatim. Sumber sekunder diperoleh dari peraturan/jurnal/artikel yang berhubungan dengan tema Penulis. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan dokumentasi, adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deduktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan analisis mendalam mengenai interaksi antara koalisi partai politik dan pembentukan undang-undang dalam kerangka sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi partai politik berpengaruh signifikan terhadap pembentukan dan kualitas undang-undang yang. Kombinasi sistem multipartai dengan presidensial sangat memungkinkan presiden terpilih tidak memiliki dukungan partai politik di parlemen yang memadai, untuk mendapat dukungan parlemen presiden cenderung membuka kompromi dengan membentuk koalisi besar. Seringkali produk hukum yang dihasilkan mengesampingkan kepentingan masyarakat. Konfigurasi politik hukum yang otoriter akan cenderung menghasilkan produk hukum yang ortodoks atau menindas. Tingginya tingkat pengujian materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi mencerminkan adanya masalah dalam proses legislasi yang dipengaruhi oleh kepentingan jangka pendek serta negosiasi yang melibatkan banyak pihak. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa banyak undang-undang yang kurang mencerminkan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*, sehingga kualitas legislasi perlu diperbaiki untuk mencapai kemaslahatan umat.

Saran yang diajukan meliputi perlunya pemberantasan dalam pembentukan koalisi partai politik untuk mencapai stabilitas pemerintahan yang lebih baik serta pembentukan regulasi hukum yang lebih jelas guna mendorong tata kelola yang transparan dan akuntabel. Memperkuat kaderisasi partai politik juga mempengaruhi jalannya pemerintahan yang baik, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang juga diharapkan dapat diperkuat untuk menciptakan legislasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan publik

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEPSI KOALISI PARTAI POLITIK, SISTEM PRESIDENSIAL DAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.....	21
A. Koalisi Partai Politik dalam Teori Pembagian Kekuasaan (<i>Trias Politica</i>)	21
1. Bentuk dan Fungsi Partai Politik.....	21
2. Konsep Koalisi Partai Politik dalam sistem presidensial	26
3. Teori pembagian kekuasaan (<i>Trias Politica</i>).....	27
C. Teori Pembentukan Undang-undang.....	32
1. Proses dan Mekanisme Pembentukan Undang-undang.....	30
2. Politik Hukum Pembentukan Undang-undang	34

D. Teori <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	36
BAB III PENGARUH KOALISI PARTAI POLITIK DI PARLEMEN TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG	40
A. Penerapan Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia	40
B. Eksistensi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang	42
C. Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Pembentukan Beberapa Undang-undang atas inisiasi Presiden.....	45
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja	46
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara	49
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia	51
BAB IV ANALISIS PENGARUH KOALISI PARTAI POLITIK DI PARLEMEN TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG	53
A. Implikasi Sistem Multpartai dalam Sistem Pemerintaha Presidensial di Indonesia.....	53
B. Analisis Kualitas Undang-undang atas Pengaruh Koalisi Partai Politik di Parlemen	59
C. Konsep Koalisi Partai Politik dalam <i>Fiqh Siyasah</i>	61
D. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pembentukan Undang-undang yang dipengaruhi Koalisi Partai Politik	62
1. Pembentukan Undang-undang dalam Konsep <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	62
2. Pengaruh Kolisi Partai Politik dalam Pembentukan Undang-undang	64
3. Kualitas Undang-undang dalam Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	67
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

- Abra, Emy Hajar. "Problematika Sistem Multipartaidalam Bingkai Konstitusi Indonesia." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, No. 2 (Desember 2022).
- Ahmad Naufal Nabaw, Rapif Sultan Al Farizi. "Konsep Trias Politica Dan Penerapannya Di Sistem Pemerintahan Indonesia." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* (2023) 1, No. 2 (Januari 2024): 1–25. <Https://Doi.Org/10.11111>.
- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyah.Pdf.* Bantul: Semesta Aksara, 2019.
- Anggoro, Syahriza Alkohir. "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, No. 1 (7 Agustus 2019). <Https://Doi.Org/10.26905/Idjh.V10i1.2871>.
- Ansori, Lutfil. "Pembentukan Kabinet Koalisi Dalam Sistem Presidensial Multi Partai Di Indonesia." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 25 Desember 2023, 316–34. <Https://Doi.Org/10.24252/Ad.Vi.42086>.
- Asri Agustiwi, Dan Riana Susmayanti. *Ilmu Perundang- Undangan*. Banten: Pt Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Badan Geologi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dan Siti Hidayati. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, No. 2 (30 Maret 2019): 224–41. <Https://Doi.Org/10.23920/Jbmh.V3n2.18>.
- F. Putuhena, M. Ilham. "Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, No. 3 (31 Desember 2012): 343. <Https://Doi.Org/10.33331/Rechtsvinding.V1i3.89>.
- Febriyanti, Doris, Dan M Jerry Pratama. "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 2 (1 Januari 2017).
- Gusman, Delfina. "Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi Dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara" 8, No. 3 (2024).
- Gusmansyah, Wery. "Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Dan Hukum Islam." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, No. 2 (8 Desember 2019): 177. <Https://Doi.Org/10.29300/Imr. V4i2.2831>.

- Hadi, Solikhul. "Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum" 9, No. 2 (2015).
- Hapsari, Yasinta Dyah Paramitha, Dan Retno Saraswati. "Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold Pada Pemilu Serentak Terhadap Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, No. 1 (31 Januari 2023): 70–84. <Https://Doi.Org/ 10.14710/Jphi.V5i1.70-84>.
- Hawari, Nadirsah, Uin Raden Intan Lampung, Dan Uin Raden Intan Lampung. "Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah 'Dar'u Al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb Al-Mashalih'" 10 (Mei 2024).
- Isaliani, Thimoty Pradhitya, Dan Sunny Ummul Firdaus. "Konsep Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia" 4, No. 2 (2020).
- Isra, Saldi. "Hubungan Presiden Dan Dpr." *Jurnal Konstitusi* 10, No. 3 (20 Mei 2016): 399. <Https://Doi.Org/10.31078/Jk1032>.
- Junaidi, Veri. "Relasi Presiden Dan Dpr Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai" 3, No. 1 (2020).
- Kafin Muhammad. "Perubahan Mekanisme Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Jil : Journal Of Indonesian Law* 4, No. 1 (15 Juni 2023): 1–26. <Https://Doi.Org/10.18326/Jil.V4i1.1000>.
- Kamarudin. "Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang." *Perspektif Hukum*, 6 November 2015, 184–203. <Https://Doi.Org/ 10.30649/Ph.V15i2.35>.
- Kodiyat Ms, Benito Asdhie. "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan." *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, No. 1 (30 Maret 2019): 1–12. <Https://Doi.Org/ 10.30596/Edutech.V5i1.2756>.
- Lestari, Amanda Dea. "Implikasi Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensil Indonesia." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6 (Desember 2022).
- M Eza Helyatha Begouvic. "Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah," T.T.
- Marlina, Rika. "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 1 (10 Maret 2018). <Https://Doi.Org/ 10.30659/ Jdh. V1i1.2631>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.Pdf*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Faizur Ridha. "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an." *Tafse: Journal Of Qur'anic Studies* 4 (Desember 2019). <Https://Jurnal.Ar-Raniry.Ac.Id/Index.Php/Tafse>.

- Munali, Diva Sharni, Nurlaili Rahmawati, Dan Nur Aini Kurniawati. "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja: Menyoal Proses Legislasi Dalam Pembentukannya." *Jurnal Kertha Semaya* 11 (2023): 714–28.
- Najma Syamila, Rasji. "Penerapan Teori Trial Politica Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 5, No. 1 (Mei 2024).
- Nurhaliza, Siti. "Koalisi Partai Nasionalis Dan Partai Islam Pilkada Labuhan Batu Tahun 2020 Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah." *Jurnal El-Thawalib* 3, No. 5 (31 Oktober 2022): 811–21. <Https://Doi.Org/10.24952/El-Thawalib.V3i5.6199>.
- "Presiden Joko Widodo Sahkan Uu 61/2024 Tentang Perubahan Uu 39/2008 Tentang Kementerian Negara." 17 Oktober 2024. <Https://Setkab.Go.Id/Presiden-Joko-Widodo-Sahkan-Uu-61-2024-Tentang-Perubahan-Uu-39-2008-Tentang-Kementerian-Negara/>.
- Qomariah, Siti, Dan Mhd Fakhrurrahman Arif. "Prosedur Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1, 6 (Juli 2023).
- R, Achmad Safiudin, Jazim Hamidi, Dan Tunggul Anshari. "Urgensitas Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Fatwa Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, No. 2 (26 Desember 2018): 113–25. <Https://Doi.Org/10.17977/Um019v3i2p113-125>.
- Rishan, Idul. "Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia'." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, No. 2 (1 Mei 2020). <Https://Doi.Org/10.20885/Iustum.Vol27.Iss2.Art1>.
- Sabrina, Amanda Feby, Dan Rifansyah Nugraha. "Analisis Hukum Partai Politik Dalam Koalisi Kabinet Prabowo-Gibran." *Jurnalhukumdankewarganegaraan* 8, No. 4 (2024).
- Saraswati, Retno. "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif," No. 1 (2012).
- Setiawan, Zenal Setiawan Zenal, Dan Irwansyah. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* 2, No. 1 (2023): 68–75.
- Shofiyah, Roidatus, Dan Abdul Majid. "Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah Dalam Konstitusi Republik Indonesia," T.T.
- Suciana Rambe, Dinda, Dan Ely Dasnawati. "Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perspektif Sosiologi Hukum." *Wicarana* 2, No. 2 (5 Oktober 2023): 88–100. <Https://Doi.Org/10.57123/Wicarana.V2i2.38>.

Titik Triwulan Tutik. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Prenadamedia Group, 2017.

Torik Abdul Aziz Wibowo, Hasman Zhafiri Muhammad. "Lameduck Session Dan Autocratic Legalism (Studi Revisi Undang-Undang Kementerian Negara)." *At-Ta'lim: Studi Al-Qur'an Dan Hadits, Pendidikan Islam, Dan Hukum Islam* 4 (17 Desember 2024).

Triadi, Irwan, Ilham Firmansyah, Jesamine Margareth Kayla Sidabutar, Dan Rachel Lubis. "Perspektif Hukum Tata Negara Tentang Sistem Multipartai Dalam Pemerintahan Indonesia Yang Menganut Sistem Presidensial" 1, No. 3 (2024).

Wardhani, Lidya Christina. "Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Pelaksanaan Sistem Presidensial Di Indonesia" 3 (2019).

Wuisang, Ari, Dan Yunani Abiyoso. "Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika Serikat Dan Indonesia : Sebuah Pencarian Presidensialisme Yang Efektif." *Palar | Pakuan Law Review* 8, No. 1 (13 Februari 2022): 294–308. <Https://Doi.Org/10.33751/Palar.V8i1.4812>.



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**